



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 07 Januari 2017

Halaman: 13

Dewan Perwakilan Daerah RI Ingatkan Komitmen Menjaga Kawasan Malioboro

Hafidh Minta Semua Unsur Ramah kepada Wisatawan

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia meminta segenap warga dan pelaku usaha di kawasan Malioboro untuk menjaga citra kawasan wisata dan ekonomi itu.

JANGAN sampai banyak wisatawan dari luar daerah yang merasa kecewa karena ulah oknum pedagang kaki lima (PKL) maupun tukang parkir di kawasan tersebut yang menerapkan tarif tinggi alias *nutuk*.

"Jangan sampai ada kesan kalau kawasan Malioboro itu banyak pedagang atau parkir yang gorok dengan harga tinggi. Ini harus benar-benar dijaga dan menjadi tanggung jawab bersama," ujar anggota DPD RI dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hafidh Asrom dalam kunjungan kerjanya di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Jumat (6/1).

Hafidh menjelaskan, pihaknya memang ikut fokus mengikuti penataan Malioboro. Saat ini Malioboro telah menjadi pusat kota bertaraf internasional. Apalagi, dengan *launching* penataan Malioboro yang

BERSIH - Jajaran tenda PKL Malioboro pascadirevitalisasi, belum lama ini. Wajah baru Malioboro ini diharapkan bisa dijaga ketertibannya oleh semua pihak.

ke halaman 14

Hafidh Minta
• Sambungan Hal 13

cukup viral.

"Orang yang pernah ke sini akan datang lagi ke Jogja, begitu juga yang belum ke Jogja. Jadi orang ke Jogja tidak ke Malioboro, kurang pas gitu," ulasnya.

Pihaknya pun meminta agar beberapa aspek di kawasan tersebut seperti kebersihan, tata tertib, penataan PKL, dan perilaku orang yang berkecimpung di Malioboro, harus benar-benar diperhatikan. Selain itu, persoalan itu juga menjadi tanggung jawab bersama.

"Maka, Malioboro harus benar-benar di-manage dengan baik," katanya. Penjabat (PJ) Wali Kota

Yogyakarta, Sulistyono menjelaskan, pihaknya tetap berkomitmen untuk menjaga agar malioboro tetap bisa bersih dan dinikmati oleh wisatawan. Namun, persoalan kebersihan yang selalu menyisakan masalah bukan persoalan yang mudah diselesaikan.

"Di sana, banyak orang yang datang dan silih berganti, sehingga masalah buang sampah di sembarang tempat ini tetap ada. Apalagi, banyak orang," ujar Sulistyono.

Namun demikian, dia menilai bahwa petugas tetap berkeliling untuk membersihkan dan selalu mengingatkan wisatawan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Begitu pula mereka juga terus berkomitmen untuk menjaga kawasan yang menjadi ikon Yogyakarta ini.

Papan peringatan

Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan ini, Sulistyono juga mewacanakan adanya pemasangan papan peringatan di kawasan tersebut.

Papan peringatan ini tak lain adalah berisi imbauan agar para pengguna fasilitas bisa memperhatikan kenyamanan wisatawan dengan tidak buang sampah dan parkir sembarangan.

"Nanti ada papan peringatan dan setelah ditingkatkan terus pasti akan ada sanksi nanti ke depannya," tegas Sulistyono.

Lebih lanjut dalam kunjungan kerja DPD tersebut, juga berkaitan dengan realisasi Dana Transfer Daerah (DTD) seperti

DAU, DAK, DBH dan Dana Desa tahun anggaran 2016. Selain DTD, Asrom juga menggali aspirasi terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, yang ditandatangani PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, khususnya aspek kesiapan anggaran terkait pengalihan 8 urusan pemerintah berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014.

Sementara itu, masing-masing kepala OPD juga menyampaikan aspirasi mereka terkait penanganan banjir, masalah Terminal Giwangan, perpindahan, pendidikan, dan pengalihan karyawan (ASN) dari OPD tertentu ke Provinsi DIY. (**agung ismi-yanto**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005